



**INDONESIA DIASPORA NETWORK – IDN-NL**  
***TASK-FORCE MALUKU***

Den Haag, 17 Juli 2014

Kepada yang terhormat,

1. Prof. Dr. Thomas Pentury, M.Si. Rektor Universitas Pattimura
2. Dr. C. A. Alyona Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku
3. Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag.Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon

Pertama-tama disampaikan dengan hormat bahwa kelompok masyarakat Maluku yang menyebutkan diri sebagai Pemerintah Republik Maluku Selatan (RMS), pada tanggal 15 Juni 2014, telah menyebarluaskan surat pernyataan kepada seluruh komunitas masyarakat Maluku di Belanda.

Pokok isi surat pernyataan tersebut menjelaskan tentang kerjasama RMS dengan Universitas Pattimura, Universitas Kristen Indonesia Maluku, dan Institut Islam Negeri Ambon, menyangkut penyelenggaraan kegiatan seminar yang akan diselenggarakan pada tanggal 2-4 Agustus 2014.

Seminar tersebut berjudul "**Beta Maluku Mau Maju**" dengan sub-judul "**Pertemuan orang basaudara**". Seminar tersebut merupakan bagian dari dialog antar masyarakat Maluku di Belanda dan Maluku di Indonesia.

Menanggapi rencana kegiatan seminar tersebut, perkenankan kami menyampaikan bahwa pada dasarnya kami menghormati dan mendukung setiap inisiatif yang bermaksud memberikan kontribusi bagi Perdamaian dan Rekonsiliasi maupun saling bertoleransi dan menghormati.

Untuk menghindari kesalahpahaman, pada kesempatan ini, kami ingin menjelaskan dan menekankan bahwa pernyataan dalam surat tersebut semata merupakan pemikiran sepihak dari RMS di Belanda. Pernyataan tersebut tidak mewakili pandangan seluruh masyarakat Maluku di Belanda. Seperti diketahui bahwa Masyarakat Maluku di Belanda terdiri dari berbagai kelompok organisasi dan komunitas sosial yang memiliki cita-cita, aspirasi politik, pandangan sosial dan masa depannya yang berbeda dengan RMS.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami sebagai salah satu bagian dari komunitas masyarakat Maluku di Belanda, menyatakan tidak mendukung atas tujuan dan agenda dari seminar tersebut diatas. Seminar tersebut secara jelas bermaksud

untuk mendorong kesadaran Masyarakat Maluku untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini secara eksplisit diakui oleh RMS dalam garis kebijaksanaan politiknya. Motivasi utama munculnya inisiatif seminar ini adalah sebagai upaya merealisasikan dari bagian dari kebijakan politik RMS yang bernama "Bersama-sama lebih kuat".

Kebijakan politik tersebut antara lain berbunyi sebagai berikut: "*Pemerintah RMS berpendapat bahwa fokus aktivitas dan pekerjaan Pemerintah RMS harus dipindah ke tanah air Maluku. Berdasarkan atas notisi Pemerintah RMS 'Bersama-sama lebih kuat', perkembangan saat ini di Indonesia, dan juga oleh karena prasangka/bias yang ada mengenai RMS dan agama maka Pemerintah RMS berpendapat bahwa pembukaan dialog dengan saudara2 sebangsa dan setanah air kita adalah satu priotas yang tinggi.*

Kami juga telah mendengar bahwa informasi yang disampaikan oleh RMS di Ambon sangat berbeda sekali dengan apa yang telah disebarluaskan di dalam komunitas Maluku di Belanda.

Dari berbagai pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan resmi/tidak resmi RMS di Belanda, inisiatif seminar tersebut mendapat dukungan. Demikian pula menyangkut pernyataan terkini tentang tindak penahanan warga Maluku di Ambon. Disebutkan bahwa seminar ini telah didukung dan diakui juga oleh Simon Saija yang berpandangan : "Sangat penting bahwa kita semua berjuang bersama-sama supaya kita bisa memperbaiki kedaulatan RMS independen"

Pada hakekatnya, kami menghormati keinginan dan hak salah satu kelompok masyarakat Maluku untuk mempunyai cita-cita dan aspirasi politik. Namun demikian, adanya agenda untuk mendorong kemerdekaan politik bagi masyarakat Maluku di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah menjadikan kami tidak dapat menyetujui kegiatan seminar tersebut.

Pertimbangan kami adalah, bahwa dialog dengan dan untuk Maluku merupakan kepentingan dari setiap warga Maluku, baik yang bermukim di Belanda, di Indonesia maupun di mana saja di dunia ini. Dengan demikian, dialog tersebut tidak seharusnya menjadi monopoli dari RMS. Dialog dengan Maluku tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen untuk kepentingan kelompok tertentu dengan mengedepankan aspirasi politiknya sendiri.

RMS bebas untuk mengatur dialog sendiri, tetapi RMS tidak berhak untuk berbicara dengan mengatasnamakan seluruh komunitas masyarakat Maluku di Belanda.

Oleh karenanya, kami meminta kepada Universitas Pattimura, Universitas Kristen Indonesia Maluku dan Institut Agama Islam Negeri Ambon untuk segera mengakhiri kerjasama dengan organisasi RMS, termasuk dalam penyelenggaraan seminar tersebut diatas.

Disamping itu, kami memandang perlu bahwa para Rektor Universitas Pattimura, Universitas Kristen Indonesia Maluku dan Institut Agama Islam Negeri Ambon, mengeluarkan pernyataan bersama tentang pentingnya suatu dialog antar setiap segmen komunitas masyarakat Maluku dengan lebih mengutamakan kesejahteraan dan menjauhkan dari agenda yang dapat menimbulkan konflik politik. Dialog yang menjunjung tinggi partisipasi seluruh Masyarakat Maluku di Belanda dan di Indonesia. Dialog yang mengedepankan agenda tentang pentingnya mengupayakan masa depan kehidupan Masyarakat Maluku yang lebih baik, penuh persaudaraan, perdamaian dan kesejahteraan.

Dengan demikian masyarakat Maluku sebagai komunitas akan semakin maju, professional, berdedikasi bagi kemanusiaan dan mampu berperan positif bagi terwujudnya kesejahteraan dan perdamaian baik di Indonesia maupun di Belanda serta pergaulan dunia internasional.

Demikian, atas perhatian, kerjasama dan tanggapannya diucapkan terima kasih.

**Task-Force Maluku  
Indonesia Diaspora Network – Belanda (IDN NL)**

**Sam Pormes  
(ketua)**

**Thomas Sikteubun  
(sekretaris)**